

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa *globalization* saat sekarang, perusahaan yang menjalankan bisnis semakin bersaing. Maka dari itu, berakibat kepada perusahaan harus memiliki kemampuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya. Ini dilakukan untuk mencegah kebangkrutan dan mengurangi persaingan. Salah satu cara untuk mengantisipasi persaingan adalah dengan membuat kebijakan strategis, efektif, dan efisien untuk perusahaan. Indonesia membutuhkan kebijakan tambahan untuk mendukung lingkungan bisnis karena merupakan negara yang sedang berkembang. Infrastruktur yang baik akan memfasilitasi kinerja perusahaan.

Infrastruktur adalah sistem yang memiliki fisik dan memungkinkan transportasi, drainasi, gedung, dan fasilitas publik lainnya untuk kebutuhan dasar masyarakat dan ekonomi. Infrastruktur yang menghubungkan pulau satu sama lain termasuk jalan tol, bandara darat, bandara udara, dan pelabuhan transportasi air. Pemerintah bertanggung jawab atas pemeliharaan infrastruktur ini.

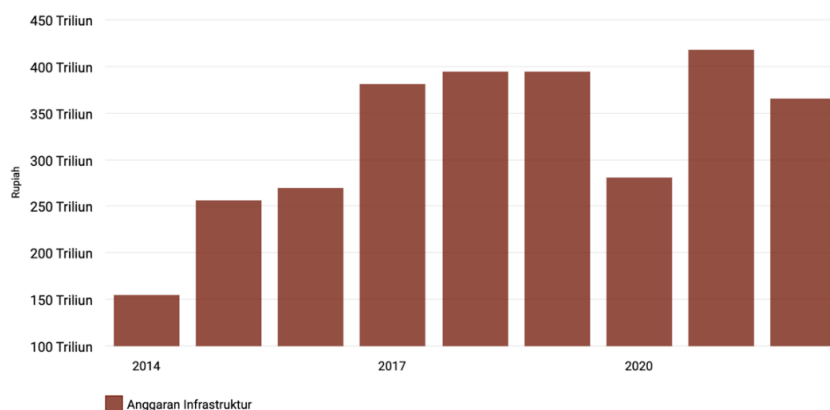
Arus atau kebutuhan akan barang atau jasa yang diperlukan akan meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi. Sebagai contoh, saat ini semua tersedia secara online, yang membuat mendapatkan barang dari yang paling sederhana hingga yang paling sulit menjadi lebih mudah. Namun, ada hambatan, yaitu jarak antara produsen dan konsumen. "Jarak" dapat berarti jarak antara dua kota, pulau, atau bahkan negara. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur lalu lintas dan pengaturan lalu lintas yang baik harus diimbangi. Perusahaan selalu membutuhkan dana tambahan karena bisnis terus berkembang. Perusahaan membutuhkan dana yang besar untuk investasi di pasar modal untuk mengatasi hal tersebut.

Presiden Joko Widodo resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2014. Semenjak itu, Presiden Joko Widodo menjadikan pengembangan infrastruktur Indonesia menjadi prioritas, yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menarik

investor asing untuk berinvestasi dalam proyek infrastruktur dalam negeri. Menurut [Menpan](#) bahwa pembangunan infrastruktur harus di percepat dan adanya pemangkasan hambatan investasi. Percepatan pengembangan infrastruktur akan memangkas hambatan investasi yang dialami oleh investor luar negeri dan juga investor dalam negeri. Investasi infrastruktur memerlukan waktu yang cepat dan sigap, dikarenakan jika investasi dilakukan secara lama, maka akan lama juga pembangunan hasil investasi tersebut yang menjadi terhambat. Maka dari itu, pemangkasan hambatan investasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh Indonesia.

Indonesia sangat memerlukan banyak pembangunan infrastruktur sebagai salah satu sarana peningkatan pertumbuhan ekonomi negara. Hal tersebut akan meningkatkan daya tarik investor untuk menanamkan modal pada perusahaan infrastruktur di Indonesia. Menurut Presiden Jokowi (2019) pada diskusi forum A1, “Infrastruktur merupakan pondasi bagi negara Indonesia untuk menjadi negara maju. Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, Pembangunan infrastruktur secara masif dan tersebar merata di semua pelosok negeri merupakan pondasi bagi negara Indonesia dan akan menjadi landasan bagi masa yang akan datang. Hal tersebut akan menjadi modal bagi Indonesia untuk menjadi negara maju”. Menurut Jokowi (2019) pada diskusi forum A1, “Infrastruktur juga akan memunculkan banyak titik yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang baru, sehingga peredaran dan perputaran uang tidak hanya akan berputar pada ibukota yaitu DKI Jakarta”.

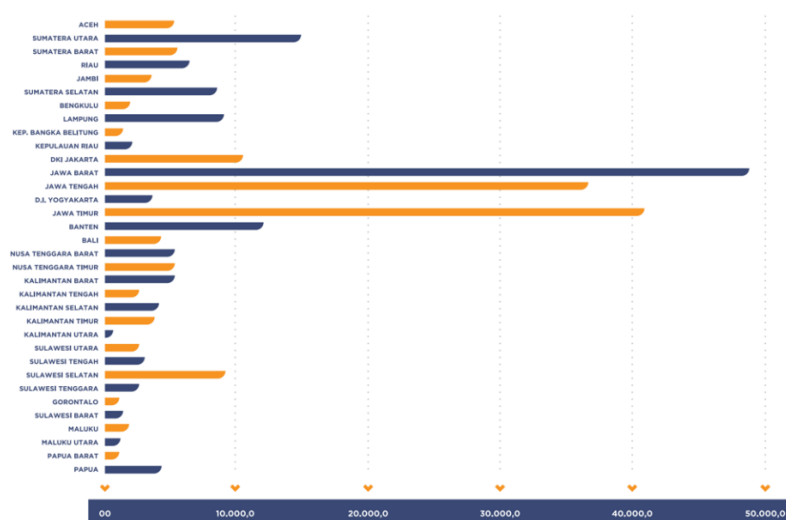
Gambar 1 Data Anggaran Infrastruktur 2014-2022



Sumber: BPS, Laporan Kemenkeu

Kebijakan Presiden Joko Widodo secara tidak langsung akan mengundang berbagai investor asing untuk membantu negara Indonesia mencapai target infrastrukturnya. Kebijakan tersebut meliputi meningkatnya anggaran infrastruktur di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo. Peningkatan tersebut meningkat secara drastis dari 154.7 triliun rupiah pada tahun 2014 menjadi 256.1 triliun rupiah pada tahun 2015. Peningkatan anggaran infrastruktur tersebut mencapai angka tertingginya pada tahun 2021 untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur pasca pandemi covid-19 sebesar 417.4 triliun rupiah. Tidak hanya berhenti disitu, presiden juga mengeluarkan beberapa kebijakan pro investasi seperti menyederhanakan proses perizinan dalam melakukan investasi. Pemerintah memberikan sebuah pusat layanan yang dapat menyelesaikan semua urusan perizinan terkait investasi dapat selesai dalam satu hari. Tujuan diadakan kebijakan tersebut adalah untuk mengurangi biaya dan waktu selesainya perizinan terkait investasi tersebut agar dapat mengundang lebih banyak investor. Kebijakan ketiga adalah pemerintah memberikan insentif pajak dengan adanya pengurangan pajak penghasilan korporat sebanyak 100% untuk beberapa sektor seperti pariwisata, infrastruktur, dan manufaktur.

Gambar 2 Jumlah Penduduk Indonesia Per Provinsi



Sumber: PUPR 2022

Menurut grafik diatas, alasan lain mengapa infrastruktur itu penting bagi negara adalah sebaran penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dimana jumlah penduduknya mencapai 152.787,8 ribu jiwa atau sama dengan 56,03% dari seluruh penduduk Indonesia. Sebaran penduduk yang tidak merata akan meningkatkan permintaan berbagai kebutuhan seperti perumahan, infrastruktur, lahan, dan kebutuhan lain khususnya kepada daerah yang memiliki konsentrasi penduduk yang tinggi. Daerah yang memiliki pembangunan yang pesat atau infrastuktur yang memadai, akan memiliki daya tarik yang tinggi bagi penduduk lain untuk pindah ke daerah tersebut. Perpindahan penduduk tersebut merupakan salah satu pendorong munculnya titik – titik pertumbuhan ekonomi yang baru.

Pada sebuah Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVI Tahun 2022, berlokasi di Kampus ASN Corporate University, Rachman Arief Dienaputra selaku Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, menyatakan bahwa “Kementerian PUPR selalu menawarkan kesempatan untuk dapat bekerja sama dengan pihak - pihak yang terlibat sehingga dapat mempercepat pemenuhan target pembangunan nasional, khususnya dalam hal pendudukan infrastruktur wilayah”. Arief menyatakan juga bahwa “Kementerian PUPR selalu siap bekerja sama dengan semua pihak yang terlibat untuk

Ahmad Naufali Azmi, 2023

ANALISIS PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, LEVERAGE, DAN INFLASI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN SEKTOR INFRASTRUKTUR DI BEI

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Manajemen

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

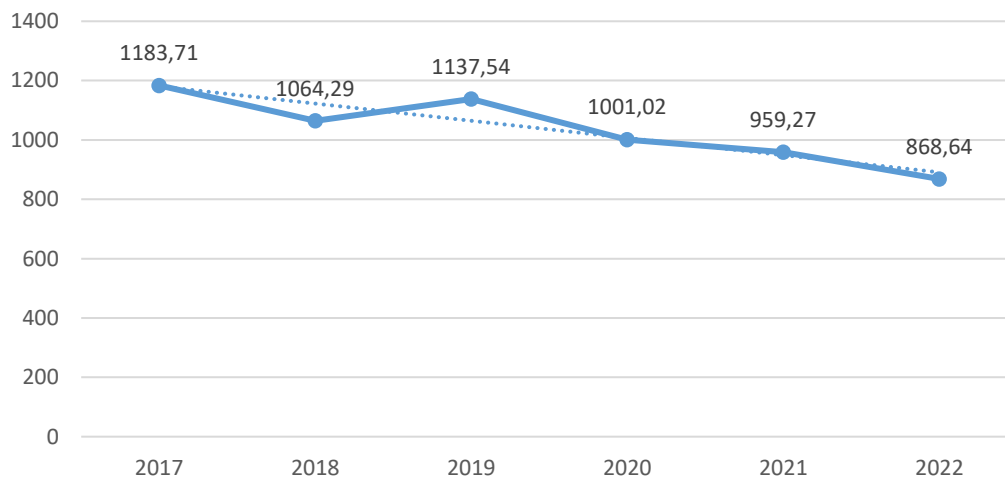
mempercepat pemenuhan target pembangunan nasional, terutama dalam hal dukungan infrastruktur wilayah. Namun, karena keterbatasan anggaran, Kementerian PUPR telah memilih program-program yang paling prioritas. Oleh karena itu, daerah harus mendapatkan dukungan dan keterbukaan dari Kementerian PUPR untuk bekerja sama dalam menentukan prioritas wilayah dan kolaborasi dalam pendanaan pembangunan infrastruktur”.

Investor asing akan membuat sentimen perusahaan yang baik, dimana masyarakat akan melakukan investasi berdasarkan sentimen – sentimen tersebut di Pasar Modal. Menurut Andrew M. Chisholm (2002), “Pasar modal merupakan tempat dimana yang membutuhkan dana dengan yang memiliki dana dapat melakukan transaksi tanpa harus bertemu secara langsung Instrumen yang digunakan dalam pasar modal bersifat berjangka panjang (lebih dari satu tahun).” Pasar modal termasuk salah satu sumber pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena dapat menjadi sumber pendanaan bagi berbagai perusahaan dan bank.

Nilai saham di pasar modal merefleksikan nilai perusahaan. Investor akan tertarik untuk memiliki saham perusahaan jika bisnis yang dijalankan berhasil. Laporan keuangan perusahaan menunjukkan kinerja yang baik. Laporan keuangan harus dikeluarkan oleh emiten dalam kurun periode tertentu. Investor dapat menggunakan informasi laporan keuangan ini ketika mereka mengambil sebuah kebijakan investasi seperti pembelian, penjualan, atau investasi saham. Nilai pasar saham perusahaan akan menunjukkan nilainya. Nilai pasar saham yang lebih tinggi mengindikasikan bahwa nilai perusahaan lebih tinggi. Hal ini penting bagi perusahaan yang sudah menjadi perusahaan publik karena nilainya dapat mengindikasikan nilai asetnya, seperti surat berharga. Keputusan tentang investasi, pembiayaan, dan manajemen aset juga mengindikasikan nilai perusahaan. Data historis nilai gabungan perusahaan infrastruktur (IDX INFRA) dapat ditemukan di sini:

Gambar 3 Grafik IDX INFRA 2017-2022

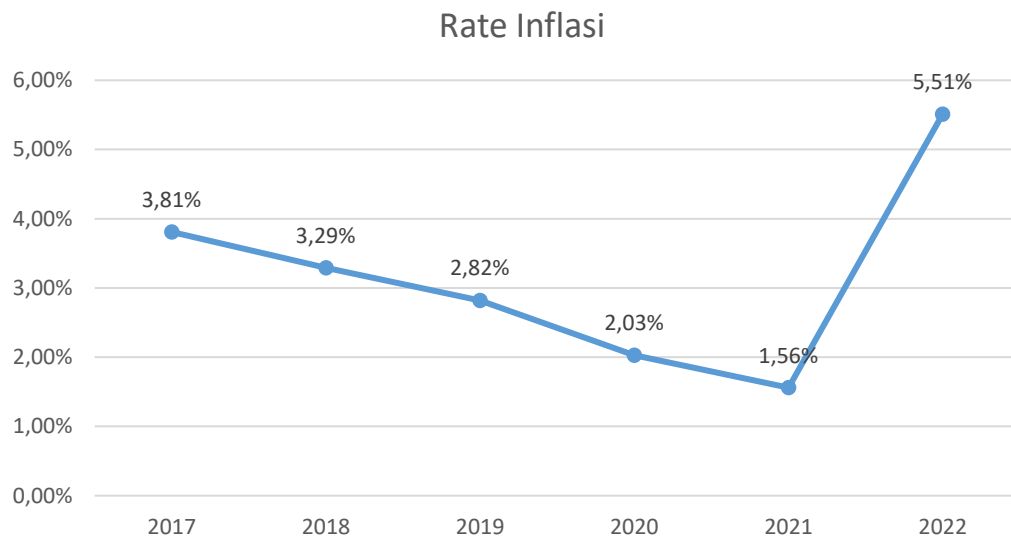
Nilai perusahaan Gabungan IDX Infra



Sumber: Investing.com

Grafik diatas memperlihatkan adanya pergerakan Indeks Harga Saham Infrastruktur yang cenderung fluktuatif. Harga saham merupakan cerminan dari nilai perusahaan yang Harga penutupan pada akhir 2017 berada pada 1183.71 mengalami penurunan pada akhir 2018 mencapai 1064.29. Pada akhir tahun 2019, Indeks harga mengalami peningkatan kembali mencapai 1137.54, yang kemudian menurun menjadi 1001.02 pada tahun 2020 dan 959.27 pada akhir tahun 2021. Perubahan nilai perusahaan infrastruktur Indonesia antara 2017 dan 2021 berkemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor. Ketidakstabilan politik pada pemilihan presiden 2019 merupakan salah satu alasan mengapa adanya fluktuasi harga. Pasar modal terpengaruh dikarenakan adanya ketidakpastian tentang masa depan sektor infrastruktur melalui kebijakan yang telah dibuat oleh presiden sebelumnya. COVID-19 juga merupakan alasan adanya perlambatan ekonomi dimana tingkat pertumbuhan GDP Indonesia menurun menjadi 2.97% pada 2020. Terlihat bahwa nilai perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan yang terduga yaitu profitabilitas, likuiditas, dan *leverage*, tetapi juga ada faktor eksternal yang mempengaruhi nilai perusahaan seperti inflasi.

Gambar 4 Grafik Inflasi 2017-2022



Sumber: BPS

Grafik tersebut menunjukkan tren penurunan rata-rata tingkat inflasi dari tahun 2017 hingga 2022. Berdasarkan data inflasi yang diperoleh dari BPS, tingkat inflasi sebesar 3,81% pada tahun 2017 dan menurun sebesar 3,29% pada tahun 2018. Inflasi mengalami penurunan yang signifikan dari 2,82% di tahun 2019 menjadi 2,03% di tahun 2020. Hal ini dapat dikaitkan dengan dampak pandemi COVID-19 di Indonesia yang mempengaruhi daya beli masyarakat dan menyebabkan penurunan inflasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diperlihatkan dan beberapa penelitian sebelumnya maka penelitian ini diberi judul **“ANALISIS PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, LEVERAGE, DAN INFLASI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN SEKTOR INFRASTRUKTUR YANG TERDAFTAR PADA BEI.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah nilai profitabilitas berpengaruh pada nilai perusahaan infrastruktur di Bursa Efek Indonesia.

Ahmad Naufali Azmi, 2023

ANALISIS PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, LEVERAGE, DAN INFLASI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN SEKTOR INFRASTRUKTUR DI BEI

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Manajemen

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

2. Apakah nilai likuiditas berpengaruh berpengaruh pada nilai perusahaan infrastruktur di Bursa Efek Indonesia.
3. Apakah nilai leverage berpengaruh berpengaruh pada nilai perusahaan infrastruktur di Bursa Efek Indonesia.
4. Apakah tingkat inflasi berpengaruh berpengaruh pada nilai perusahaan infrastruktur di Bursa Efek Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan rumusan permasalahan masalah ini, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan penganalisaan:

1. Untuk menganalisis pengaruh dari profitabilitas terhadap nilai perusahaan Perusahaan sektor Infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh dari likuiditas terhadap nilai perusahaan perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh dari leverage terhadap nilai perusahaan perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh dari inflasi terhadap nilai perusahaan perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan manfaat dari penelitian ini.

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan salah satu sumber informasi dalam menambah pengetahuan dan wawasan terkait dengan rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio leverage, dan inflasi.

2. Aspek Praktis

a. Bagi investor

Diharapkan hasil penelitian ini dapat di gunakan oleh para calon investor sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi pada perusahaan infrasturktur yang terdaftar di BEI.

b. Bagi manajemen perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mempertimbangkan pengembangan bisnis sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.